

**KOORDINASI DALAM KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDERS
PENGEMBANGAN DESA WISATA JUNGSEMI KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEN KENDAL**

Diah Farah Fauziah, Retna Hanani, Kismartini



Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The development of Tourism Villages in Kendal Regency is currently progressing, supported by the vision and mission of the Kendal Regent, which are to realize Kendal Reliable, Superior, Prosperous and Equitable and focus on four pillars of development, namely Industry, Tourism, MSMEs, and Generation 4.0. Jungsemi Village is one of the tourist villages located in the coastal area of Kendal Regency whose development is being intensified by the government. The success of Jungsemi tourism village development does not only come from one actor. Collaboration between stakeholders is needed to optimize the implementation of development in the tourism sector. The existence of less harmonious relationships and sectoral egos between stakeholders in the coordination process makes the reason for the importance of this research. This research aims to analyze coordination between stakeholders and analyze the supporting and inhibiting factors of coordination in the development of Jungsemi Tourism Village. This research uses a qualitative descriptive method with data collection through observation, interviews, and documentation. The results showed that the coordination carried out by stakeholders in the development of Jungsemi Tourism Village has been running dynamically, which is characterized by changes and progress in tourism management. However, the competence of stakeholders owned by Karang Taruna is still low. The agreement and commitment in coordination owned by the Pokdarwis, private sector, and the community are also not optimal. The lack of knowledge in the field of tourism and the low human resources of the community have not become the carrying capacity of the tourism village to develop. Supporting factors consist of unity of action, communication, and division of labor, while discipline is an inhibiting factor. Suggestions are to provide socialization and motivation, increase commitment, hold sustainable collaboration, coordinate through proactive communication, and increase understanding of tourism awareness.

Keywords: Coordination, Stakeholders, Tourism Village

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat

berpartisipasi sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di

wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan desa wisata. Berdasarkan perda tersebut, pemberdayaan potensi desa wisata di Jawa Tengah dibagi kedalam tiga bagian yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

Berdasarkan data BPS, jumlah desa wisata pada tahun 2017 hingga 2020 di Jawa Tengah jumlahnya terus mengalami kenaikan. Berikut tabel jumlah Desa Wisata di Jawa Tengah tahun 2017 hingga 2020 :

Tabel 1. 1



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2020

Peningkatan pariwisata di Jawa Tengah ini tentu diikuti dengan perkembangan desa wisata di kabupaten/kota. Perkembangan Desa Wisata di Kabupaten Kendal semakin maju didukung dengan visi misi Bupati Kendal saat ini yakni untuk mewujudkan

Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan serta berfokus pada empat pilar pembangunan, yaitu Industri, Pariwisata, UMKM, dan Generasi 4.0. Untuk mewujudkan visi misi tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh *stakeholders* melalui interaksi dalam pengelolaan pariwisata.

Desa Jungsemi merupakan salah satu desa wisata yang berada di daerah pesisir Kabupaten Kendal. Wisata yang berkembang di Desa Jungsemi antara lain wisata alam meliputi Wisata Pantai Indah Kemangi, wisata budaya kesenian barongan, wisata edukasi budidaya ikan nila dan ternak kambing etawa, wisata kuliner khas daerah pesisir, serta wisata religi.

Tabel 1.2



Sumber : Laporan Tahunan Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2020-2021. Dokumen tidak dipublish.

Jumlah pengunjung yang fluktuatif disebabkan karena adanya pandemi dan pembatasan kegiatan terutama di tempat

wisata. Selain itu, jumlah pengunjung di tahun sebelumnya tidak terdata dikarenakan pengelolaan oleh Pokdarwis dan BUMDES yang kurang terkoordinir. Namun, secara keseluruhan jumlah pengunjung setiap tahunnya terus meningkat.

Pada pertengahan februari 2021, Desa Jungsemi bersama tujuh desa lain di Kendal meraih Anugrah Desa Wisata 2021 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anugerah ini merupakan bentuk nyata yang membuktikan bahwa Desa Jungsemi mampu berkembang dalam mengelola potensi desa. Serta sebagai wujud untuk mendukung visi pemerintah melalui pengembangan pariwisata. Bentuk keberhasilan Desa Wisata Jungsemi tersebut didukung oleh peran beberapa *stakeholders*. Akademisi yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi yaitu UPGRIS. UPGRIS memberikan kontribusinya dalam mengidentifikasi potensi wisata yang dimiliki Desa Jungsemi. Kemendikti melalui UPGRIS juga memberikan bantuan dana selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019 untuk pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Pemerintah yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi meliputi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal yang berperan sebagai koordinator yang mengatur dan mengkonsepsikan

segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Jungsemi serta mempromosikan pariwisata. Kementerian Desa melalui banprov dan BUMDES memberikan bantuan untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana di sekitar Desa Wisata Jungsemi. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana prasarana wisata. Namun, kerjasama tersebut tidak berlanjut dikarenakan pihak pemerintah desa tidak sepenuhnya mendukung adanya kerjasama dan hingga saat ini belum ada lagi pihak swasta yang menjalin kerjasama dengan Desa Wisata Jungsemi.

Sejak awal berdirinya wisata Pantai Indah Kemangi sebagai salah satu objek wisata di Desa Wisata Jungsemi tidak berjalan secara lancar. Pokdarwis dan karang taruna yang berperan untuk mengelola wisata dinilai tidak maksimal dalam pengelolaannya. Pemerintah desa seperti perangkat desa juga masih ikut terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata pantai yang mengakibatkan adanya tumpang tindih pekerjaan. Sementara itu, wisata edukasi ikan nila yang diberikan oleh BAZNAS tidak berlanjut dikarenakan tidak adanya pengurus dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait pemeliharaan ikan nila.

Dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi, media yang ada seperti website

desa jungsemi dan website jadesta belum memuat informasi secara lengkap terkait dengan Perkembangan Desa Wisata. Peran pemerintah desa dalam membantu promosi juga masih sangat kurang. Jika pengunjung membuka web Desa Wisata Jungsemi hanya akan ada foto Desa Wisata Jungsemi serta keragaman yang dimilikinya tanpa adanya keterangan lain yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Belum ada media sosial yang secara aktif memberikan informasi mengenai Desa Wisata Jungsemi. Media sebagai promotor Desa Wisata Jungsemi dalam hal ini masih memerlukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya untuk dapat terus memperbarui perkembangan Desa Wisata Jungsemi.

Keterlibatan segenap elemen dalam proses pembangunan pariwisata diharapkan mampu membawa dampak yang positif bukan hanya bagi penyelenggaraan, melainkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, diasumsikan bahwa koordinasi seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat mengoptimalisasi kegiatan pengembangan desa wisata. Melihat fenomena di atas, bahwa masalah penelitian berupa koordinasi *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata

Jungsemi, sehingga rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana koordinasi antar stakeholders Desa Wisata Jungsemi dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat koordinasi dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Jungsemi?

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Chander dan Plano dalam Keban (2004) mengemukakan administrasi publik merupakan proses sumber daya dan personel publik saling berkoordinasi untuk menformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam publik. Waldo dalam Pasolong (2008) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses manajemen yang dilakukan sesuai dengan kebijakan public untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mencapai kepentingan bersama. Nicholas Henry (dalam Alamsyah, 2016), mengidentifikasi enam paradigma dalam administrasi publik, sebagai berikut (Alamsyah, 2016):

1. Dikotomi politik-administrasi (1900-1925). Periode ini ditandai oleh terbitnya buku Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926). Dalam bukunya *Politics and Administration*, Goodnow menegaskan bahwa ada dua fungsi negara beserta organ-organnya, yaitu politik dan administrasi.

2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937). Prinsip-prinsip administrasi diajukan oleh Gulick & Urwick, orang-orang kepercayaan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Tujuh prinsip dikenal dengan akronim POSDCoRB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting).

3. Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950 - 1970). Pada paradigma ketiga administrasi publik kembali ke disiplin induknya yaitu ilmu politik. Pengaruh dari gerakan mundur ini adalah adanya pembaruan definisi mengenai lokus yakni di birokrasi pemerintah, tetapi melepaskan hal yang berkaitan dengan fokus.

4. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970). Paradigma keempat terjadi hampir bersamaan waktunya dengan berlakunya paradigma ketiga. Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer dikembangkan secara ilmiah dan mendalam.

5. Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970 -). Paradigma

ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Sejak 1970, administrasi publik diakui sebagai suatu bidang ilmu. Lokusnya adalah pada masalah-masalah publik dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik dan political-economy.

6. Public administration and public affair. Paradigma ini merupakan paradigma terakhir dan berhubungan dengan pemerintahan. Paradigma ini dimulai 1990an. Selama paradigma ini terjadi perubahan persepsi pemerintah dan administrasi yang terjadi. Perubahan tersebut dicatat dalam tiga klasifikasi, yaitu globalisasi, redefinisi dan devolusi.

Manajemen Publik

Hyde dan Shafritz (dalam Pasolong, 2008:96), mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Manajemen menurut Hasibuan (2011:2) diartikan sebagai ilmu seni yang mempelajari bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Fayol (dalam Badrudin, 2013), fungsi manajemen publik terdiri dari :

a. Perencanaan (Planning), yaitu proses menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengorganisasian (Organizing), yaitu proses mengelompokkan kegiatan yang akan dilakukan dengan menyusun susunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab organisasi.

c. Komando (Commanding), fungsi ini berkaitan dengan kegiatan pemberian arahan, saran, bimbingan dan interaksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat terlaksana secara baik dan sesuai tujuan yang ditetapkan.

d. Koordinasi (Coordinating), yaitu kegiatan yang ada di dalam manajemen seperti menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan untuk menghindari kekeliruan, kekacauan, dan kerusakan sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan organisasi.

e. Pengawasan (Controlling), yaitu fungsi pengendalian dengan memantau dan mengoreksi kegiatan bawahan dalam melakukan tugasnya.

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek ekonomi, pariwisata berkontribusi terhadap devisa negara dan PDB. Aspek sosial, pariwisata dapat menyerap tenaga kerja, menggali seni, tradisi, dan budaya. Aspek lingkungan, pariwisata dapat menaikkan nilai produk dan jasa seperti adanya keunikan alam, laut, dan alat untuk pelestarian lingkungan alam. (Nugraha,

2020). Pengembangan pariwisata merupakan proses untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam untuk dapat dinikmati semua kalangan tanpa merusaknya. Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, pengembangan pariwisata di Indonesia memiliki tujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan;
- 2) Mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi.
- 3) Meningkatkan kepuasan wisatawan serta memperluas pasar;
- 4) Menciptakan pariwisata Indonesia yang kondusif dengan berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas KKN.

Desa Wisata

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (dalam Fikri, 2020), desa wisata merupakan kawasan yang menyajikan suasana asli pedesaan jika dilihat dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya. Priasukmana dan Mulyadin (dalam Fikri, 2020), menetapkan kunci sukses dalam pembangunan Desa Wisata, antara lain :

- 1) Pembangunan SDM melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, diskusi dan sebagainya.
- 2) Kemitraan, merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara pengelola dan mitra pariwisata. Misalnya promosi dan pelatihan.
- 3) Kegiatan pemerintahan di desa, kegiatan ini meliputi musyawarah, rapat dengan dinas terkait, penyelenggaraan pameran pembangunan di desa wisata.
- 4) Promosi, kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai media dengan menjalin kerjasama kepada wartawan dari media cetak maupun elektronik.
- 5) Festival, merupakan penyelenggaraan kegiatan yang menarik dan unik untuk menarik minat wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut.
- 6) Membina organisasi warga, pembentukan organisasi sangat diperlukan untuk menjadi wadah dalam menyamakan tujuan adanya desa wisata.
- 7) Kerjasama dengan universitas, kerjasama ini memberikan peluang terhadap desa wisata untuk memperoleh masukan dan saran untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif merupakan strategi baru yang dimiliki oleh pemerintah.

Strategi baru tersebut merupakan bentuk pemerintah yang melibatkan berbagai stakeholders secara bersama-sama dengan satu tujuan yang sama untuk membuat keputusan (Ansell dan Alison dalam Hariadi, 2019). Purnomo, dkk (2018) mengartikan collaborative governance sebagai konsep manajemen pemerintahan yang memiliki peran untuk memfasilitasi dan melaksanakan penyelesaian masalah secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, maupun NGOs. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa collaborative governance merupakan kerja sama yang tidak hanya melibatkan pemerintahan saja tetapi juga swasta dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan bersama.

Proses Collaborative governance sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (dalam Cahya, 2020), yaitu :

a. Dialog tatap muka

Dialog secara langsung antar stakeholders bertujuan untuk mengidentifikasi peluang untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menjalin komunikasi, membangun kepercayaan dan komitmen.

b. Kepercayaan

Membangun kepercayaan antar stakeholders diperlukan untuk menyadari pentingnya kolaborasi dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Komitmen

Komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari stakeholders untuk keberlanjutan pengembangan kolaborasi.

d. Pemahaman bersama

Pemahaman bersama dimaksudkan untuk menyatukan tujuan dan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama untuk mencegah kesalahpahaman.

e. Dampak sementara

Dampak sementara merupakan outcomes dari proses kolaborasi. Dampak sementara ini dapat dijadikan alternatif untuk mengembangkan keberhasilan kolaborasi.

Stakeholders

Stake diartikan sebagai kepentingan, sedangkan holder sebagai pemegang, dengan begitu stakeholders dapat diartikan sebagai pemegang kepentingan. Menurut Freedman (dalam Nuwita dkk2 2021) stakeholder merupakan kelompok atau individu yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program.

Maryono (dalam Handayani, 2017) membagi stakeholders ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Stakeholders primer Stakeholders primer merupakan stakeholder yang terlibat secara langsung dan memiliki peran kuat terkait pengembangan kegiatan.

2. Stakeholders kunci

Stakeholders kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam setiap pengambilan keputusan.

3. Stakeholders sekunder

Stakeholders sekunder atau stakeholder pendukung tidak memiliki kewenangan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

Koordinasi

Menurut Mooney dan Reily (dalam Handayani, 1990), koordinasi merupakan kegiatan menyatukan beberapa kegiatan dan tindakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. G.R Terry (dalam Hasibuan, 2007) mengidentifikasi koordinasi sebagai usaha yang dilakukan setiap unit organisasi untuk menyelaraskan tindakan atau kegiatan yang dilakukan agar tercipta keseimbangan pada organisasi. Sehingga koordinasi dapat disimpulkan sebagai proses yang dilakukan oleh setiap bagian dalam organisasi untuk menciptakan keseragaman dalam mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri koordinasi sebagaimana dijelaskan Mc Farland (dalam Handayani, 1990), yaitu : a) Adanya tanggung jawab pada seorang pemimpin dalam organisasi; b) Adanya proses yang saling berkaitan; c) Adanya aturan yang ditaati bersama dan ditetapkan sebagai pedoman; d) Kesatuan tindakan antara satu

dengan yang lainnya; e) Adanya tujuan koordinasi.

Sedangkan indikator untuk menganalisis koordinasi menurut Ndraha (2015), yaitu :

- a) Informasi, komunikasi, dan teknologi. Informasi merupakan rangkuman data dalam pengambilan keputusan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan teknologi merupakan sistem yang berbasis pada penggunaan computer untuk membantu jalannya koordinasi.
- b) Kesadaran terhadap pentingnya koordinasi dari setiap pihak yang terlibat, hal ini dapat dilihat dari jalannya komunikasi antar pihak.
- c) Kompetensi stakeholders, dilihat dari adanya keterlibatan aktor atau pejabat berwenang sesuai dengan bidang pembangunan yang berlangsung.
- d) Kesepakatan dan komitmen, kesepakatan merupakan kunci koordinasi agar tetap berjalan searah untuk mencapai tujuan.
- e) Penetapan kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi.
- f) Insentif koordinasi, yaitu adanya sanksi kepada pihak yang melanggar kesepakatan bersama.
- g) Feedback merupakan umpan balik yang muncul dalam proses koordinasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi

Dalam proses koordinasi terdapat dua factor yang mempengaruhi yaitu factor yang menjadi pendukung keberhasilan koordinasi dan factor yang menjadi penghambat jalannya koordinasi. Menurut Hasibuan (2007), factor yang menjadi mempengaruhi koordinasi tersebut yaitu :

1. Kesatuan tindakan dari setiap stakeholders yang terlibat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, pemimpin bertugas mengkoordinasikan setiap bawahan untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Komunikasi dalam koordinasi merupakan aspek penting baik bagi pimpinan atau bawahan.
3. Pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama. Pembagian kerja dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Kedisiplinan setiap anggota dalam menjalankan tugasnya. Penegakan kedisiplinan kepada setiap unit bertujuan untuk menghindari hal-hal di luar kesepakatan bersama

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung

Kabupaten Kendal. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah akademisi dari UPGRIS, Masyarakat Desa Jungsemi, Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal, Ketua BUMDES Sidodadi, Ketua Pokdarwis, Kepala Desa Jungsemi, serta media dari Radar Semarang. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, dokumen, foto, dan data statistic. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik analisis data di lapangan menggunakan model Miles and Huberman (dalam Nugrahani, 2014) terdiri dari mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan penggunaan software Nvivo. Software Nvivo memiliki keunggulan dalam membantu penelitian karena dapat membaca berbagai macam jenis data khususnya pada penelitian kualitatif. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dalam Kolaborasi Antar Stakeholders Pengembangan Desa Wisata Jungsemi

Dalam sektor publik, kolaborasi menjadi bagian penting karena melalui kolaborasi akan menciptakan kesepahaman dan komitmen antar stakeholders untuk keberlangsungan pembangunan pariwisata (Fairuza, 2017). Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan mengkoordinasikan semua yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata termasuk menjalin kerjasama dengan stakeholders lainnya. Melalui pemerintah desa, masyarakat sebagai pemilik potensi wisata melakukan kolaborasi dengan UPGRIS untuk meningkatkan potensi wisata dan menambah pengetahuan kepariwisataan. DISPORAPAR Kabupaten Kendal sebagai stakeholders yang menjalankan regulasi desa wisata berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta melakukan promosi pariwisata. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Perusahaan Listrik Negara, Bank Jateng, dan BAZNAS Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan pengelola desa wisata untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Desa Wisata Jungsemi. Begitupula media Radar

Semarang yang memiliki peran untuk menyebarkan informasi mengenai perkembangan Desa Wisata Jungsemi.

Masing-masing stakeholders yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi tersebut memiliki peran yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas mereka. Kolaborasi yang terjadi antar stakeholders bertujuan untuk saling memberikan manfaat dan memperoleh manfaat untuk mencapai tujuan desa wisata secara optimal melalui koordinasi.

A. Komunikasi, dan Teknologi

Proses komunikasi antar stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi bertujuan untuk meneruskan informasi yang sedang terjadi dalam desa wisata. Dalam hal ini, setiap stakeholders memiliki peranan yang berbeda, maka informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi berbeda pula. Komunikasi yang terjadi antar stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi ini bersifat aktif karena setiap stakeholders selalu mengkomunikasi baik secara langsung atau tidak langsung apabila terdapat kendala yang sedang dihadapi. Pada komunikasi langsung dilakukan melalui kegiatan rapat evaluasi setiap satu bulan sekali untuk menyampaikan perkembangan desa wisata dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing lembaga-lembaga desa. Kemudian untuk

komunikasi tidak langsung menggunakan teknologi berupa media whatsapp. Keberadaan teknologi dalam proses komunikasi ini mempermudah *stakeholders* untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan Desa Wisata Jungsemi secara tidak langsung. Penemuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Destiana, dkk (2020) dan Fatmawati dan Kurniadi (2017) bahwa komunikasi yang dilakukan antar stakeholders forum rutin dan komunikasi informal melalui media whatsapp. Selain itu, Usaha yang dilakukan stakeholders pengembangan Desa Wisata Jungsemi dalam melaksanakan koordinasi ini disebutkan juga dalam penelitian Mafaza dan Setyowati (2020) dalam unsur kolaborasi “*information sharing*”. Sebagaimana pendapat dari Adu-Ampong (2017) agar pariwisata menjadi pembangunan yang positif maka pemangku kepentingan harus saling berbagi informasi dan keputusan terkait dengan proses perencanaan pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, pemerintah desa menyadari bahwa dalam proses koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholders* tentu juga terdapat ragam pola pikir yang berbeda. Sebagai pengelola, pemerintah desa perlu membangun komunikasi yang baik untuk menyamakan persepsi.

Komunikasi tersebut dibentuk melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan desa wisata.

B. Kesadaran Terhadap Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya kerjasama, komunikasi, saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, sehingga mencapai tujuan secara optimal. Kesadaran koordinasi oleh pemerintah desa dapat dilihat dengan adanya kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam pengadaan sarana prasarana pariwisata antara lain pembangunan mushola, gazebo, toko UMKM, perbaikan akses jalan, penanaman pohon cemara disepanjang bibir pantai, serta kerjasama mitra untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Menurut Lemmetyinen dalam Yusuf dan Sella (2020), pentingnya koordinasi bagi *stakeholders* pariwisata di suatu destinasi dikarenakan perlunya partisipasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi untuk melihat adanya kesadaran dalam berkoordinasi ditandai dengan adanya kerjasama antar *stakeholders* untuk mencapai tujuan desa wisata. Kesadaran pentingnya koordinasi juga dapat dilihat

melalui forum yang dibentuk oleh DISPORAPAR Kabupaten Kendal yaitu DEWIKAW (Desa Sadar Wisata Kabupaten Kendal). Forum tersebut menjadi sarana komunikasi pemerintah kepada seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Kendal untuk mengevaluasi kegiatan pariwisata yang telah terlaksana.

Dalam pendekatan manajemen, koordinasi merupakan kebutuhan setiap institusi. Koordinasi *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata mencakup kesadaran untuk melakukan tindakan terhadap tujuan yang telah disepakati. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholders.

C. Kompetensi Stakeholders

Kompetensi *stakeholders* dalam collaborative governance berkaitan dengan keterlibatan aktor atau pejabat berwenang sesuai dengan bidang pembangunan (Ndraha, 2015). Di Desa Wisata Jungsemi kompetensi stakeholders bervariasi, beberapa stakeholders memiliki kompetensi sangat tinggi. Namun, masih terdapat juga stakeholders yang memiliki kompetensi rendah. Kompetensi stakeholders dalam pengembangan desa wisata dapat diketahui melalui analisis identifikasi stakeholders. Identifikasi stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi dilihat dari pengaruh, khususnya pengaruh stakeholders dalam

memberikan kontribusi fasilitas, usulan, dukungan anggaran, dan kemampuan dalam mengembangkan Desa Wisata. Maryono (dalam Handayani, 2017) membagi stakeholders ke dalam tiga jenis, yaitu :

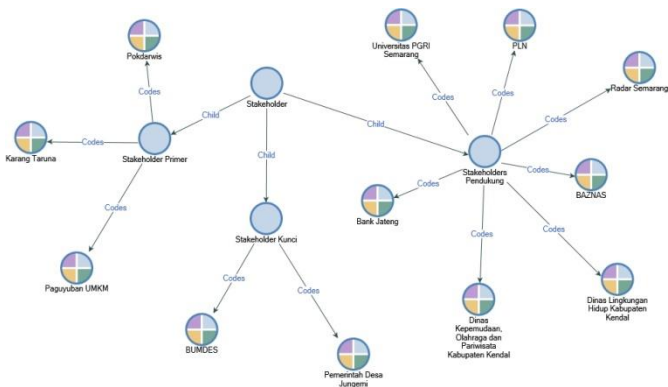
a) Stakeholders primer meliputi Pokdarwis, Karang Taruna, dan Paguyuban UMKM. Pokdarwis memiliki keterlibatan dalam menghubungkan dengan pemerintah, memperluas jaringan, dan melaksanakan kegiatan yang ada di Desa Wisata Jungsemi. Begitupula Karang taruna Desa Jungsemi hanya memiliki kemampuan sebagai pelaksana atau penyelenggara kegiatan berdasarkan arahan pengelola Desa Wisata Jungsemi. Tugas dan fungsi karang taruna dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi akan berjalan apabila terdapat arahan dari pengelola, ini menunjukkan kompetensi yang dimiliki karang taruna masih rendah. Paguyuban UMKM memiliki kemampuan dalam menggerakkan masyarakat untuk berwirausaha serta kemampuan menjalankan UMKM sejak dibentuknya desa wisata. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan Handayani (2017) bahwa masyarakat desa sebagai pelaksana dalam pembangunan destinasi wisata memberikan kontribusinya dalam melayani dan menyediakan jasa pariwisata. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020), masyarakat, pemerintah

dan akademisi menjadi stakeholders primer dalam pengembangan wisata.

b) Stakeholders kunci meliputi Pemerintah Desa Jungsemi dan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Desa Jungsemi dalam mengembangkan Desa Wisata menekankan perannya sebagai penghubung dan pelaksana. BUMDES memiliki kemampuan dalam pengembangan SDM, kemampuan memberikan gagasan, dan membangun jaringan dengan akademisi untuk pendampingan pariwisata. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Handayani (2017) bahwa Badan Pengelola Pantai Karang Jahe (BP KJB) yang merupakan sub unit dari Bumdes menjadi stakeholders primer sebagai bagian dari unsur yang bertugas mengelola pariwisata di daerahnya.

c) Stakeholders pendukung meliputi Univeritas PGRI Semarang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, Media massa Radar Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Perusahaan Listrik Negara, Bank Jateng, dan BAZNAS. Stakeholder tersebut melibatkan dirinya secara sukarela terhadap kegiatan pengembangan Desa Wisata Jungsemi sesuai dengan kontribusi dan kemampuan yang dimiliki.

Gambar 3. 1 Identifikasi Stakeholder



Sumber : Data diolah menggunakan *Software Nvivo, 2023*

Hasil penelitian identifikasi stakeholders ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destiana, dkk (2020), Handayani (2017), dan Saputra (2020). Hasil penelitian menyatakan bahwa identifikasi stakeholders berdasarkan pengaruhnya terbagi menjadi tiga, stakeholders primer, stakeholders kunci, dan stakeholders primer.

D. Kesepakatan dan Komitmen

Seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi memiliki kesepakatan yang dibuat dalam proses kolaborasi. Kesepakatan bersama dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi antara Pemerintah Desa Jungsemi dengan BUMDES mengacu pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mensejahterkan masyarakat dengan adanya Desa Wisata jungsemi. Sedangkan

kesepakatan bersama antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan Pemerintah Desa mengacu pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal sebagai penyedia informasi, fasilitas kepariwisataan, dan pelaku kegiatan promosi wisata. Disisi yang sama, Universitas PGRI Semarang dengan pengelola memiliki kesepakatan hanya sebatas mitra, maka bentuk kesepakatan berupa bukti telah melakukan kerjasama sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada universitas. Begitupula kesepakatan yang terjadi dengan media massa.

Pengelola desa wisata juga memiliki komitmen yang tegas untuk tidak menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) bahwa penolakan adanya investor oleh pemerintah Desa Punjulharjo dikarenakan keinginan pihak desa untuk mengelola secara mandiri dan rasa takut warga desa menjadi tamu di rumah sendiri. Selain itu, koordinasi antar stakeholders pengembangan Desa Wisata Jungsemi masih terdapat kendala berkaitan dengan kesepakatan pengelolaan yang dilakukan oleh pokdarwis. Pokdarwis yang semula memiliki kesepakatan sebagai pengelola wisata ternyata belum mampu

mengelola desa wisata karena kualitas SDM yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pariwisata. Komitmen yang tercipta antara masyarakat, sektor swasta, dengan pengelola desa wisata juga belum berjalan dengan baik. SDM masyarakat yang masih rendah belum menjadi daya dukung desa wisata untuk berkembang. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penemuan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri, dkk (2021) dan Adu-Ampong (2017) disebutkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata telah memiliki komitmen yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya kesepakatan dalam pengembangan pariwisata memudahkan para pemangku kepentingan untuk menciptakan koordinasi dalam bekerja sama.

E. Penetapan Kesepakatan

Penetapan kesepakatan dapat dilihat dari kesatuan pemikiran, persepsi, dan tujuan untuk memajukan desa wisata. Proses penetapan kesepakatan yang dilakukan pengelola dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi dilaksanakan melalui komunikasi untuk menyamakan persepsi. Kesepakatan dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi saat ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Jungsemi dibuktikan dengan keterlibatannya dalam paguyuban UMKM. Keberadaan UMKM

tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan kesepakatan yang diciptakan pengelola dalam menyamakan persepsi terkait keberadaan desa wisata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Jungsemi.

Dari hasil penelitian, sinkronisasi terlihat diantara pemangku kepentingan telah membuat satu pemikiran yang sama yaitu untuk memajukan Desa Wisata Jungsemi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuwita, dkk (2021) bahwa kesatuan tindakan pada seluruh stakeholders pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka, ditandai dengan adanya kesatuan pikiran untuk mengembangkan objek wisata secara bersamaan. Kesatuan tindakan ini merupakan bentuk koordinasi yang terarah dan disepakati bersama di semua tingkatan. Dalam hal ini penetapan kesepakatan yang dibuat oleh para stakeholders menjadi panduan atau acuan tugas masing-masing.

F. Insentif Koordinasi

Insentif koordinasi merupakan sanksi bagi stakeholders yang mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Adanya sanksi diperlukan memperkuat koordinasi yang terjadi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Pemerintah Desa Jungsemi sebagai pimpinan dalam pengelolaan Desa Wisata Jungsemi belum menerapkan adanya intensif koordinasi bagi stakeholders yang

ingkar atau tidak menaati kesepakatan. Tetapi terdapat peraturan yang telah disepakati kepada stakeholders internal desa yaitu Pokdarwis, BUMDES, Karang Taruna, dan paguyuban UMKM. Pokdarwis, BUMDES, dan Karang Taruna memiliki salah satu peran untuk membantu kegiatan pengembangan desa wisata dengan melibatkan kapasitas sumber daya manusianya. Keterlibatannya dalam pengembangan desa wisata merupakan kontribusi yang bersifat sukarela dan tidak menerima honor. Hal ini telah disepakati dengan pengelola Desa Wisata Jungsemi Begitu pula peraturan yang ditetapkan kepada paguyuban UMKM. Pedagang yang melanggar peraturan harus menerima sanksi berupa penutupan kios secara permanen. Dalam implementasinya, belum ada pedagang yang menerima sanksi berupa penutupan kios secara permanen. Hingga sampai saat ini bentuk pelanggaran hanya diberikan teguran oleh pengelola. Selain itu, terdapat peraturan apabila terdapat swasta yang ingin terlibat dalam Desa Wisata Jungsemi yaitu harus menyediakan minimal Rp 100.000.000;.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga menemukan bentuk insentif lainnya yaitu insentif sosial yang tercipta antara paguyuban UMKM dengan pengelola. Insentif sosial ini tercipta karena masyarakat merasa diberdayakan dan terjadi peningkatan kesejahteraan

ekonomi dengan menjadi pelaku UMKM melalui adanya desa wisata. Keberadaan insentif sosial menunjukkan bahwa pengelola memiliki sikap loyal terhadap stakeholders yang menaati peraturan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handayani (2017) dan Prabandary (2017) bahwa koordinasi dalam pengelolaan pariwisata belum di dukung dengan adanya sanksi yang mengikat. Namun, temuan penelitian yang dilakukan oleh Nuwita (2021) menyebutkan bahwa dalam koordinasi pengembangan wisata Desa Sungai Langka terdapat sanksi koordinasi berupa hukuman dikeluarkan dari susunan para stakeholder dan memberikan ganti rugi atas perbuatan ingkar yang dilakukan.

G. Feedback

Menurut Anshel dan Gash (dalam Zaenuri, dkk 2021) proses kolaborasi dapat dikatakan berhasil apabila tercapai tujuan dan manfaat. Hasil tersebut memberikan feedback ke dalam proses kolaborasi yang mendorong terjadinya komitmen antar stakeholders. Adanya keterbukaan pengelola memberikan feedback yang baik untuk perbaikan Desa Wisata Jungsemi di masa yang akan datang. Pemerintah desa sebagai pengelola melakukan upaya untuk menyaring aspirasi dari beberapa stakeholders, sebagai praktiknya Pemerintah Desa Jungsemi rutin

melakukan pertemuan guna membahas sinkronisasi beberapa stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Redyanto, dkk (2018) dan Saputra (2020) bahwa masukan dari pemerintah dan akademisi dapat membantu pengelola dalam proses pengembangan kampung wisata. Adu-Ampong (2017) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa feedback dalam proses kolaborasi dapat meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi dalam Kolaborasi Antar Stakeholders Pengembangan Desa Wisata Jungsemi

1. Faktor Pendukung

A. Kesatuan Tindakan

Adanya kesatuan tindakan dapat dilihat dari peran pemimpin dalam menjalin koordinasi. Menurut Mc Farland (dalam Handayani, 1990) kesatuan tindakan dalam koordinasi dimaknai sebagai usaha yang dilakukan pemimpin dalam menciptakan keserasian untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, pada pengembangan Desa Wisata Jungsemi, integrasi koordinasi dapat berjalan secara terarah disemua tingkatan karena adanya kesatuan tindakan yang terarah dari pengelola.

Pengelola Desa Wisata Jungsemi berusaha menciptakan keserasian melalui pertemuan-pertemuan yang menghadirkan stakeholders yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi. Pengelola juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan stakeholders lain yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Dibuktikan dari penghargaan yang di terima Desa Wisata Jungsemi pada tahun 2022, yaitu masuk peringkat 300 besar desa wisata tingkat nasional dari total seluruh peserta yang berjumlah 1.800. Ini merupakan pencapaian bagi Desa Jungsemi yang terhitung sebagai desa wisata baru dan masih dalam tahap pengembangan.

B. Komunikasi

Komunikasi yang terjadi dalam pengembangan desa wisata secara koordinatif dilakukan antara institusi khususnya bagi stakeholders kunci yakni Pemerintah Desa Jungsemi kepada stakeholders primer yaitu masyarakat yang terlibat dalam Pengembangan Desa Wisata terdiri dari Pokdarwis, Karang Taruna, Paguyuban UMKM. Dalam proses komunikasi ini stakeholders yang menjadi pendukung dalam pengembangan desa wisata tidaklah hanya semata-mata berkomunikasi belaka namun untuk penyampaian kegiatan yang telah dilakukan baik di secara langsung atau

melalui media perantara. Hal ini bertujuan agar komunikasi bersifat efektif dan tidak terjadi kesenjangan atau miskomunikasi antar pihak terkait.

C. Pembagian Kerja

Menurut Redyanto (2018) keberhasilan pengembangan wisata terletak pada kolaborasi sumber daya pelaksana yang sesuai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian kerja yang dilakukan oleh stakeholders pendukung yaitu Universitas PGRI Semarang, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Begitupula dengan stakeholders kunci dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Jungsemi dan BUMDES. Pembagian Kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi stakeholders akan memudahkan koordinasi dalam pengembangan desa wisata.

Namun demikian, pembagian kerja yang dilakukan oleh pokdarwis dan karang taruna masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan karang taruna tidak memiliki tugas dan fungsi khusus dalam keterlibatannya di Desa Wisata Jungsemi, melainkan hanya membantu tugas yang dilakukan oleh pokdarwis.

2. Faktor Penghambat

Kedisiplinan

Kedisiplinan dalam koordinasi dapat dilihat dari kesepakatan dan komitmen yang dimiliki antar stakeholders. Meskipun Pokdarwis memiliki SK yang dikeluarkan oleh DISPORAPAR Kabupaten Kendal tetapi dalam realisasinya, pokdarwis belum memahami secara penuh tugas pokok, dan fungsi yang harus dijalankan. Dalam hal ini pokdarwis belum mampu memberi kesadaran kepada masyarakat mengenai konsep sapta pesona yang harus dimiliki desa wisata. Masih terdapat masyarakat yang belum menyadari keberadaan desa wisata dengan tidak menjaga ketertiban dan keramahan terhadap wisatawan.

PENUTUP

Kesimpulan

Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi sudah berjalan dengan dinamis, yang ditandai dengan adanya perubahan dan kemajuan dalam pengelolaan pariwisata. Namun, kompetensi stakeholders yang dimiliki oleh karang taruna masih rendah. Kesepakatan dan Komitmen dalam koordinasi yang dimiliki oleh pokdarwis, pihak swasta, dan masyarakat juga belum optimal. Kurangnya pengetahuan di bidang pariwisata dan SDM masyarakat yang masih rendah belum menjadi daya dukung desa wisata untuk berkembang. Sementara itu, faktor pendukung koordinasi terdiri

dari kesatuan tindakan, komunikasi, dan pembagian kerja, sedangkan kedisiplinan menjadi faktor penghambat.

Saran

1. Keterbatasan kompetensi dan sumber daya manusia yang dimiliki karang taruna menjadi tugas pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi dan motivasi agar karang taruna dapat berperan aktif dalam pengembangan Desa Wisata Jungsemi.
2. Perlu adanya peningkatan komitmen pada kelompok sadar wisata Desa Jungsemi agar dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi serta membangun *trust* kepada pengelola desa wisata yang dapat dilakukan melalui pembinaan dan studi banding ke desa wisata lain.
3. Diharapkan terdapat koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan membuka peluang stakeholders swasta untuk membantu pengembangan Desa Wisata Jungsemi dengan memberikan sikap saling percaya, dan saling berkolaborasi.
4. Melaksanakan koordinasi melalui komunikasi yang bersifat proaktif dan dilakukan secara dua arah untuk menyalurkan tindakan antar *stakeholders*.
5. Perlu dilakukannya penanaman akan sadar wisata oleh pegawai pariwisata melalui kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholders yang ada di desa serta menetapkan peraturan dan sanksi tegas.

yang dibuat pengelola berkaitan dengan keanggotaan pokdarwis dan karang taruna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adu-Ampong, E. A. (2017). Divided we stand: institutional collaboration in tourism planning and development in the Central Region of Ghana. *Current Issues in Tourism*, 20(3), 295-314.
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Publik Profetik*, 04(2), 172–199
- Badrudin, 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Fatmawati, F., & Kurniadi, B. (2017). Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Puncak Damar Di Kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang (Studi Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumedang). *Jurnal Sosial Politik Unla*, 22(1), 27-36.
- Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 2(1), 24-32.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40-53.
- Handyaningrat, Soewarno. (1990) *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

- Hariadi, Andi. (2019). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, T. Yeremias. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media, Yogyakarta
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik, 11(1), 7-12.
- Ndraha, T. (2015). Kybernology. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, R. (2020). Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Umbul Ponggok Kabupaten Klaten. Tesis. Universitas Airlangga
- Nuwita, M. S., Sulistiowati, R., & Meiliyana, M. (2021). Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, 3(3), 267-280.
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Prabandary, N. W. (2017). Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur. Journal of Public Policy and Administration Research, 6(6), 570-581.
- Purnomo, E. P. (2018). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Redyanto, F. W., Salahudin, S., & Salviana, V. (2018). Model Kerjasama Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. LOGOS (Journal of Local Government Issues).
- Saputra, D. (2020). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(2), 85-97.
- Syaiful, A., & Fafurida, F. (2019). Dampak Pengembangan Desa Wisata Lerep terhadap Perekonomian Pelaku Usaha Pariwisata. Indicators: Journal of Economic and Business, 1(2), 179-190.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, 8(3), 1-18.
- Yusuf, M., & Sella, K. (2020). Identifikasi Peran dan Koordinasi Pemangku Kepentingan Terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana di Atraksi Wisata Menara Siger, Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Pariwisata Terapan, 4(2), 130-146.
- Zaenuri, M., Musa, Y., & Iqbal, M. (2021). Collaboration Governance In The Development Of Natural Based Tourism Destinations. Journal of Government and Civil Society, 5(1), 51-62.